BAB II

GAMBARAN UMUM KRATON YOGYAKARTA

A. Sejarah dan Perkembangan Kraton Yogyakarta

Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi. Nama kecil beliau adalah Raden Mas Sujono, merupakan adik dari Susuhunan Paku Buwono II, Sunan Mataram. Keberhasilanya dalam menumpas perlawanan Raden Mas Said (Pangeran Samber Nyowo), yang merupakan penguasa daerah Sukawati (sekarang Sragen, Provinsi Jawa Timur) telah membuat para bangsawan Mataram mulai memperhitungkan Nama Pangeran Mangkubumi. Sebelumnya, Pangeran Mangkubumi telah dijanjikan atas tanah Sukawati jika berhasil mengalahkan Raden Mas Said. Namun karena Sang Sunan tidak menepati janji, dalam hal ini karena Susuhunan mendapat pengaruh dari Gubernur Jendral Van Imhof yang merupakan pimpinan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), yang mempunyai kepentingan politik terhadap Susuhunan Pakubuwono II. Pangeran Mangkubumi yang merasa kecewa karena janjinya tidak ditepati kemudian berbalik mendukung dan bergabung dengan Raden Mas Said melawan Sunan Paku Buwono II yang bersekutu dengan VOC.

Pangeran Mangkubumi adalah Putra dari Susuhunan Amangkurat IV (Raden Mas Suryoputro). Setelah bergabung dengan Raden Mas Said, kemudian mereka melancarkan perlawanan terhadap Sunan Paku Buwono II, yang berlanjut terhadap Sunan Paku Buwono III. Perlawanan ini berlangsung selama sembilan tahun, terhitung sejak tahun 1746. Pihak Susuhunan yang

dibantu VOC tidak bisa memadamkan perlawanan ini. Untuk mencari jalan keluar, pada akhirnya Sunan Pakubuwono III terpaksa melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Perundingan ini dilakukan di daerah Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, perundingan ini kemudian dikenal sebagai Perjanjian Giyanti.

Perjanjian Giyanti dilakukan oleh tiga pihak, yaitu Sunan Paku Buwono III sebagai wakil dari Kesultanan Mataram, Nicolaas Hartingh wakil dari VOC dan Pangeran Mangkubumi. Isi perjanian itu antara lain membagi wilayah Mataram menjadi dua, gelar raja untuk diubah, Pengeran Mangkubumi memakai gelar yang lain karena gelar Susuhunan akan dipakai oleh penerus Susuhunan Paku Buwono II yaitu Susuhunan Pakubuwono III, yang diangkat oleh Belanda melalui VOC pada tanggal 11 Desember 1749. Tanggal 11 Desember 1749 M didalam *Tarikh* Jawa sangat penting. Karena pada hari itu merupakan hari yang sama dalam *Tarikh* Jawa yaitu hari Jum'at Legi, tanggal 1 Syuro tahun Alif 1675. Juma'at Legi, tanggal 1 Syuro tahun Alif 1675, sama dengan 11 Desember 1749 M, yang menjadi penting adalah dalam kalender Jawa, dimana dalam kalender Jawa, hitungan dan huruf tahunnya sama. Kejadian ini dapat berulang setelah kurun waktu 120 tahun sejak pertama kali kalender Jawa dibuat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memerintah tahun 1613-1645 M. Tahun Jawa ini dibuat sebagai pengganti tahun Saka, yaitu tahun Saka 1554 diganti dengan tahun Jawa Jum'at Legi 1 Syuro 1555.

Sesuai dengan isi perjajian Giyanti tentang pemisahan gelar antara Paku Buwono III dan Pangeran Mangkubumi, gelar Susuhunan tetap dipakai oleh Paku Buwono, kemudian Pangeran Mangkubumi menggunakan gelar lain. Gelar yang dipilih oleh Pangeran Mangkubumi adalah Hamengku Buwono. Setelah bergelar Hamengku Buwono I, Pangeran Mangkubumi menunjuk Raden Mas Said sebagai Patih, ia juga diangkat menjadi menantu. Dijodohkan dengan Gusti Kanjeng Ratu Maduretno, atau nama kecilnya adalah Inten, Bendoro Raden Ajeng Inten.

Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sunan Paku Buwono III dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah* (Beliau yang Terhormat, Yang Mulia Sultan Penguasa yang Sah Atas Dunia yang Mempunyai Kekuasaan untuk Menentukan Perdamaian atau Peperangan Serta Merupakan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Pada Saat Terjadi Peperangan dan Sekaligus Sebagai Pemuka Agama) atau lazim dikenal dengan nama Sultan Hamengku Buwono I.

Sejarah panjang Kraton Yogyakarta memberikan gambaran bahwa Kraton Yogyakarta telah melalui beberapa fase semenjak berdirinya, hingga sekarang ini. Hal ini menunjukkan bahwa Kraton Yogyakarta tetap menunjukkan eksistensinya mulai sejak zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan seperti sekarang ini. Melalui proses yang panjang, dengan

berbagai persoalan yang datang tidak membuat Kraton Yogyakarta melemah, tetapi semakin membuat Kraton Yogyakarta bertambah kuat. Dibuktikan dengan masih eksisnya Kraton Yogyakarta sampai sekarang.

Sejarah yang khas kraton kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan bagian dari sejarah survivalitas Indonesia sebagai sebuah bangsa dan Negara. Kekhasan itu menyangkut bukan saja kontribusi DIY dalam mendirikan dan menjaga eksistensi Negara Kesultanan Republik Indonesia, tapi juga secara simbolik dan aktual dalam mengisi visi keIndonesiaan secara lebih kongret. Penelaahan atas sejarah Kraton Kesultanan Yogyakarta dan Indoensia menunjukan status keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan politik sadar yang diambil penguasa Yogyakarta, yakni Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, dan bukan pemberian dari entitas politik nasional.[1]

Ketika Jepang menyerang di akhir Perang Dunia II, pemerintahan Yogyakarta benar-benar mandiri. Kemudian pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sutan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII menyambut berdirinya pemerintahan Republik Indonesia serta memberikan pernyataan bahwa mereka berdiri di belakang dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.[2] Tidak hanya saat proklamasi, saat menjelang kemerdekaan pun Kesultanan Yogyakarta berperan aktif untuk

[1].Cornelis Lay,et.al., "Keistimewaan Yogyakarta: Naskah Akademi dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta", *Mongraf on public & Gaverment Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 politik local dan otonomi daerah, Vo. 2 No, 1 2008, hlm. 12* dalam Pamela Maher Wijaya, Tesis kekuasaan Politik Raja Kraton Kesultanan Ngayogyakarta hadiningrat dalam Perspektif Partai Politik, UIN, 2011 hal : 27

[2]. Y.B. Margantoro, Sri Sultan Hamengku Buwono X, hlm. 52 dalam ibid hal : 27

mendukung adanya NKRI, terbukti adanya partisipasi B.P.H. Puroboyo dan B.P.H. Bintoro di BPUPKI sebagai delegasi resmi Kesultanan Yogyakarta.[3]

Setelah pernyataan dari Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII untuk berdiri di belakang RI, Presisen RI segera mengutus Mentri Negara MR. RM Sartono dan Menteri Keuangan MR. AA Maramis ke Yogyakarta untuk menyampaikan piagam mengenai kedudukan Yogyakarta. Sampai akhirnya Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII mengeluarkan amanat bersama tertanggal 30 Oktober 1945 yang didahului dengan amanat yang dibuat tanggal 5 September 1945 secara terpisah tetapi bunyi sama, yaitu menyatakan bahwa Yogyakarta yang berbentuk kerajaan, merupakan Daerah Istimewa bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. [4]

Amanat Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kanjeng Sultan dan Amanat Sri paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arui Paku Alam tersebut dapat dideskripsikan sebagai novum hukum yang menyatakan bahwa status Yogyakarta, dalam ranah Yuridis formal, telah mengalami perubahan dari sebuh daerah *Zelfbesturende Landschappen* atau daerah Swapraja menjadi daerah yang bersifat istimewa di dalam territorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5] Dasar hukum yang melengkapi lahirnya Daerah Istimewa Yogyakarta [6] terutama adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18.[7]

---

[3]. P.J. Suwarno, Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942 -1974: Sebuha Tinjauan Historis (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm 160 dalam Ibid : 27

[4].Y.B. Margantoro, Sri Sultan Hamengku Buwono X, hlm. 52-53 dalam ibid hal : 28

[5] Cornelis Lay, et.al., "Keistimewaan Yogyakarta,"Hal 16 dalam ibid 28

[6] Yang semangatnya dirumuskan dengan kalimat : *hamamayu hayuning Bawono, sepi ing pamrih rame ing gawe*

B. Profil, Visi, Misi, dan Filosofi Kraton Yogyakarta

1. Profil

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang sekarang berlokasi di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Setelah kesultanan tersebut secara resmi telah menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1950, kompleks bangunan Kraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini.

Kraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata di Kota Yogyakarta. Sebagian kompleks Kraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka Kraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, Kraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik, memiliki balairung-balairung mewah dan lapangan serta paviliun yang luas.

Kraton Yogyakarta mulai didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti di tahun 1755. Lokasi Kraton ini konon adalah bekas sebuah pesanggarahan yang bernama Garjitawati. Pesanggrahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah raja-raja Mataram (Kartasura dan Surakarta) yang akan dimakamkan di Imogiri.

---

[7]. Y.B. Margantoro, Sri Sultan Hamengku Buwono X, hlm. 52-53 dalam ibid hal : 28

Versi lain menyebutkan lokasi Kraton merupakan sebuah mata air, Umbul Pacethokan, yang ada di tengah hutan Beringan. Sebelum menempati Kraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono I berdiam di Pesanggrahan Ambar Ketawang yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

Secara fisik istana para Sultan Yogyakarta memiliki tujuh kompleks inti yaitu Siti Hinggil Ler (Balairung Utara), Kamandhungan Ler (Kamandhungan Utara), Kedhaton, Sri Manganti, Kamagangan, Kamandhungan Kidul (Kamandhungan Selatan), dan Siti Hinggil Kidul (Balairung Selatan).

Selain itu Kraton Yogyakarta memiliki berbagai warisan budaya baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah. Di sisi lain, Kraton Yogyakarta juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika nilai-nilai filosofi begitu pula mitologi menyelubungi Kraton Yogyakarta.[8]

Nilai-nilai inilah yang kemudian menjaga Kraton Yogyakarta dari pengaruh dunia luar. Terutama pada masa sebelum kemerdekaan. Dimana pada masa itu, penjajahan dari bangsa Eropa masih sangat aktif dan kuat. Hal ini tentunya memberikan pengaruh terhadap Kraton Yogyakarta.

[8] Wikipedia (diunduh pada tanggal 5 Mei 2017)

Namun dapat kita lihat, sampai sekarang nilai-nilai yang dianut oleh Kraton Yogyakarta tetap terjaga dengan baik. Terdapat sinergi yang kuat antara pihak Kraton dengan masyarakatnya. Sehingga nilai-nilai luhur peninggalan nenek moyang mereka masih tetap terjaga dengan baik. Meskipun terdapat banyak gangguan dari pihak luar.

Selain nilai-nilai filosofis yang masih tetap tejaga, nilai-nilai mitologi juga masih kental di wilayah Kraton Yogyakarta. Pemimpin Kraton yang juga merupakan seorang pemimpin agama dapat menjaga dan menyatukan beberapa unsur mitologi dengan nilai-nilai agama. Tentunya unsur-unsur mitologi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Sebagai contoh adalah prosesi *Jamasan* dan *Sekatenan.* Dua hal ini adalah peleburan antara nilai-nilai mitologi dengan nilai-nilai agama yang tentunya tidak bertentangan satu sama lain. Dari sisi masyarakat dua hal terebut mengandung makna yang kuat. Dimana dua hal tersebut menjadi adat istiadat yang tetap dilestarikan sampai sekarang.

Prosesi *Jamasan* merupakan ritual untuk membersihkan benda-benda pusaka milik Kraton, yang mengandung makna membersihkan diri terhadap hal-hal yang kurang baik. Supaya diri kita bisa bersih dari hal-hal negatif yang dapat memberikan pengaruh kurang baik. Sehingga diharapkan dalam menjalani kehidupan, kita selalu menerima dan memberikan dampak positif dari pribadi maupun lingkungan.

Sedangkan *Sekatenan* merupakan wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan kehidupan yang baik kepada masyarakat, dan menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas Sultan yaitu sebagai pemimpin umat islam, Khalifatulloh Panatagama.

2. Visi

Visi Kraton Yogyakarta berdasarkan *Dawuh Dalem* Nomor: 01/DD/HBX/EHE-1932:

> *"Ngelestareake Lan Ngerembakakake Ajaran Budayo Ngayogyakarta Hadiningrat Kalandesan Al-Qur'an lan Hadist, Kanggo Mujudake Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dadi pusere Budoyo ing Dunyo kang sumunar saka hakekat Hamangku, Hamengku, lan Hamengkoni. tumrap rejane, panguripan Sosial Budaya Rakyat".*[9]

3. Misi

Visi Kraton Yogyakarta berdasarkan *Dawuh Dalem* Nomor: 01/DD/HBX/EHE-1932:

> *Kanti ngemban Amanahe para Luhur tumrep Ajaran Budaya, Amanahe kawulo kanggo ngelestarekake Budaya Bangsa lan tanggung jawab sajrone lelumban ana ing madyaning pasrawungan agung bangsa lan negara kanthi wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia kang adhedasar Pancasila, semono uga ing madyane pasrawungan Internasional kang saya tinarbuka.*
>
> *Ho : Mrayogaake luwih wani omong barang kang bener kuwi mula pancen bener lan kang salah kuwi mula pancen salah minangko wewujudane krenteg atine kawula dasih.*
> *Na : Ngerengkuh lan paring pengayoman tanpa mbedahake Golongan, Suku, Keyakinan lan Agama Kanthi adil.*

[9] Wawancara KRT. H. Jatiningrat. SH (wawancara dilakukan pada hari kamis, 20 april 2017)

Ca : Berjuang tanpa pamrih kanthi laku luwih akeh anggone peparing tinimbang anggone nampa, lan wani ndahadagi tanggung jawab kanthi terwaca mung kanggo rejane banga/kawula.
Ra : Ngrembakakake dadi pusere gagasan lan paring penjurung anane kahanan masyarakat kang dinamis, kreatif lan universal sifate.
Ka : Ora nerak angger-angger, lan paugeran Negara.[10]

4. Filosofi

Kraton Yogyakarta atau dalam bahasa aslinya *Karaton Kasultanan Ngayogyokarta* merupakan tempat tinggal resmi para Sultan yang bertahta di Kesultanan Yogyakarta. Karaton artinya tempat di mana "Ratu" (bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia berarti Raja) bersemayam. Dalam kata lain Kraton/Karaton (bentuk singkat dari Ke-ratu-an/Ka-ratu-an) merupakan tempat kediaman resmi/Istana para Raja. Artinya yang sama juga ditunjukkan dengan kata *Kedaton*. Kata Kedaton (bentuk singkat dari Ke-datu-an/Ka-datu-an) berasal dari kata "Datu" yang dalam bahasa Indonesia berarti Raja. Dalam pembelajaran tentang budaya *Jawa*, arti ini mempunyai arti *filosofis* yang sangat dalam[11].

Kraton Yogyakarta tidak didirikan begitu saja. Banyak arti dan makna filosofis yang terdapat di seputar dan sekitar Kraton. Selain itu istana Sultan Yogyakarta ini juga diselubungi oleh mitos dan mistik yang begitu kental. Filosofi dan mitologi tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua sisi dari sebuah mata uang yang bernama Kraton. Penataan tata ruang Kraton, termasuk pula pola dasar *landscape* kota tua

[10] *Ibid*
[11] https://id.wikipedia.org/wiki/Keraton_Ngayogyakarta_Hadiningrat dalam Sebagian diambil dari Murdani Hadiatmaja. (akses: 18/6/2017)

Yogyakarta, nama-nama yang dipergunakan, bentuk arsitektur dan arah hadap bangunan, benda-benda tertentu dan lain sebagainya masing-masing memiliki nilai filosofi dan/atau mitologinya sendiri-sendiri.

Tata ruang dasar kota tua Yogyakarta berporoskan garis lurus Tugu, Kraton, dan Panggung Krapyak serta diapit oleh Sungai Winongo di sisi barat dan Sungai Code di sisi timur. Jalan Pangeran Mangkubumi (dulu Margotomo), jalan Malioboro (dulu Maliyoboro), dan jalan Jend. A. Yani (dulu Margomulyo) merupakan sebuah *boulevard* lurus dari Tugu menuju Kraton. Jalan D.I. Panjaitan (dulu Ngadinegaran) merupakan sebuah jalan yang lurus keluar dari Kraton melalui *Plengkung Nirboyo* menuju Panggung Krapyak. Pengamatan citra satelit memperlihatkan Tugu, Kraton, dan Panggung Krapyak berikut jalan yang menghubungkannya tersebut hampir segaris (hanya meleset beberapa derajat). Tata ruang tersebut mengandung makna *"sangkan paraning dumadi"* yaitu asal mula manusia dan tujuan asasi terakhirnya[12].

Dari Panggung Krapyak menuju ke Kraton (Kompleks Kedaton) menunjukkan *"sangkan"* asal mula penciptaan manusia sampai manusia tersebut dewasa. Ini dapat dilihat dari kampung di sekitar Panggung Krapyak yang diberi nama kampung *Mijen* (berasal dari kata "wiji" yang berarti benih). Di sepanjang jalan D.I. Panjaitan ditanami pohon asam (*Tamarindus indica)* dan tanjung (*Mimusops elengi*) yang melambangkan masa anak-anak menuju remaja. Dari Tugu menuju ke Kraton (Kompleks

[12] Ibid

Kedaton) menunjukkan *"paran"* tujuan akhir manusia yaitu menghadap penciptanya. Tujuh gerbang dari Gladhag sampai Donopratopo melambangkan tujuh langkah/gerbang menuju surga (*seven step to heaven*)[13]

Tugu *golong gilig* (tugu Yogyakarta) yang menjadi batas utara kota tua menjadi simbol "manunggaling kawulo gusti" bersatunya antara raja (*golong*) dan rakyat (*gilig*). Simbol ini juga dapat dilihat dari segi mistis yaitu persatuan antara khalik (Sang Pencipta) dan makhluk (ciptaan). *Sri Manganti* berarti Raja sedang menanti atau menanti sang Raja.

Pintu Gerbang Donopratopo berarti "seseorang yang baik selalu memberikan kepada orang lain dengan sukarela dan mampu menghilangkan hawa nafsu". Dua patung raksasa *Dwarapala* yang terdapat di samping gerbang, yang satu, *Balabuta*, menggambarkan kejahatan dan yang lain, *Cinkarabala*, menggambarkan kebaikan. Hal ini berarti "Anda harus dapat membedakan, mana yang baik dan mana yang jahat".

Beberapa pohon yang ada di halaman kompleks Kraton juga mengandung makna tertentu. Pohon beringin (*Ficus benjamina*; famili *Moraceae*) di Alun-alun utara berjumlah 64 (atau 63) yang melambangkan usia Nabi Muhammad. Dua pohon beringin di tengah Alun-alun Utara menjadi lambang makrokosmos (K. Dewodaru,

[13] Ibid dalam Pocung episode Wewangunan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (Media)

dewo=Tuhan) dan mikrokosmos (K. Janadaru, jana=manusia). Selain itu ada yang mengartikan Dewodaru adalah persatuan antara Sultan dan Pencipta sedangkan Janadaru adalah lambang persatuan Sultan dengan rakyatnya. Pohon gayam (*Inocarpus edulis/Inocarpus fagiferus*; famili *Papilionaceae*) bermakna *"ayem"* (damai, tenang, bahagia) maupun *"gayuh"* (cita-cita). Pohon sawo kecik (*Manilkara kauki*; famili *Sapotaceae*) bermakna *"sarwo becik"* (keadaan serba baik, penuh kebaikan).[14]

C. Sultan Hamengku Buwono X

Sultan Hamengku Buwono X merupakan Sultan kedua yang memerintah Kraton Yogyakarta diera kemerdekaan Indonesia menggantikan ayahandanya Sultan Hamengkubu Buwono IX. Lahir dengan nama Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito pada tanggal 2 April 1946. Setelah dewasa bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai Putra Mahkota diberi gekar KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Raja Putra Nalendra Mataram.

Pada tanggal 7 Maret 1989 (Selasa *Wage* 19 Rajab 1921) menggantikan ayahnya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang meninggal di Amerika, Oktober 1988. Kemudian menjabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak 3 Oktober 1989. Beliau adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan dinobatkan sebagai raja di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono X.

[14] Ibid dalam Murdani Hadiatmaja

Dari permaisurinya Gusti Kangjeng Ratu (GKR) Hemas, Sultan memiliki 5 orang anak perempuan, yaitu Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun, Gusti Raden Ayu (GRAy) Nurma Gupita, Gusti Raden Ajeng (GRAJ) Nurkamnari Dewi, Gusti Raden Ajeng (GRAJ) Nurabja Juwita dan Gusti Raden Ajeng (GRAJ) Nur Asturi Wijareni.[15]

Hamengku Buwono X aktif dalam berbagai organisasi dan pernah memegang berbagai jabatan di antaranya adalah ketua umum Kadinda DIY, ketua DPD Golkar DIY, ketua KONI DIY, Dirut PT Punokawan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, Presiden Komisaris PG Madukismo, dan pada bulan Juli 1996 diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Gubernur DIY. Pada 2010, bersama dengan Surya Paloh, Sri Sultan Hamengku Buwono X mencetuskan pendirian Nasional Demokrat.

Setelah Paku Alam VIII wafat, dan melalui beberapa perdebatan, pada 1998 beliau ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan 1998-2003. Dalam masa jabatan ini Sultan Hamengku Buwono X tidak didampingi Wakil Gubernur. Pada tahun 2003 beliau ditetapkan lagi sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 2003-2008. Kali ini beliau didampingi Wakil Gubernur yaitu Paku Alam IX.

Dukungan rakyat terlihat nyata ketika muncul keraguan pemerintah untuk melantik Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur Yogyakarta, meski calon gubernur Yogyakarta saat itu hanya satu, Sultan Hamengku

[15] Femi Adi Soempeno, Pemimpin Dengan Tahta Rakyat, Percetakan Galangpress, Yogyakarta, Hal: 15

Buwono X. Pemerintah berpegang pada undang-undang tahun 1974, gubernur diusulkan oleh DPR tingkat I dan usul itu belum masuk ke pemerintah. Sekitar enam juta penduduk Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 1998, turun ke jalan. Mereka menyelenggarakan Mimbar Maklumat Rakyat. Hasilnya, mendaulat Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur pilihan rakyat, 3 Oktober 1998.

Meski tidak memiliki "legitimasi" sebagai pemimpin pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti ayahnya (Hamengku Buwono IX berjasa besar dalam mempertahankan pemerintahan republik, mencetuskan serangan 1 Maret di masa revolusi), aktivitas perhatian dan sosial-politik Hamengku Buwono X tidak bisa diabaikan. Dia salah satu dari empat tokoh yang di awal masa reformasi mencetuskan Deklarasi Ciganjur.

Sejak terpilih sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada 3 Oktober 1998, Sultan Hamengku Buwono X memang dikenal sebagai sosok yang netral di antara berbagai kepentingan partai politik dan pemerintah. Karenanya, Sultan Hamengku Buwono X banyak diundang dalam seminar-seminar untuk membeberkan wawasan kebangsaannya.

Dalam suatu kesempatan, Sultan Hamengku Buwono X pernah mengatakan, wawasan kebangsaan masa depan seharusnya merupakan pandangan proaktif untuk membangun bangsa menuju perwujudan cita-cita bersama sebagai suatu bangsa yang mandiri dan mampu mengembangkan

inovasi iptek bangsa sendiri, agar memiliki keunggulan daya saing yang tangguh di dunia global.[16]

Sultan Hamengku Buwono X juga berhasil melakukan terobosan-terobosan baru dalam bidang sosial dan budaya. Dimana belum lama ini beliau melakukan penggantian nama jalan lingkar atau kerap dikenal dengan ring road di kawasan DIY. Penamaan jalan ini merujuk Surat Keputusan Gubernur DIY nomor 116/KEP/2017 yang ditandatangani Sri Sultan Hamnegku Buwono X pada tanggal 24 Agustus 2017.

Di dalam Surat Keputusan tersebut, disampaikan bahwa salah satu pertimbangan pemberian nama jalan tersebut adalah untuk membangkitkan semangat persatuan bangsa. Dimana selama ada ditengah-tengah masyarakat Jawa dan Sunda terdapat gerbang pemisah akibat kejadian dimasa lampau. Untuk itu, Sultan melakukan terobosan dengan memberikan nama jalan diwilayah Yogyakarta dengan nama jalan Siliwangi dan jalan Padjajaran.

Dengan dirubahnya nama beberapa ruas jalan tersebut, diharapkan akan membangun konsolidasi yang baik antar masyarakat dari suku sunda dan jawa. Sehingga semakin mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sultan juga berharap, langkah yang telah dilakukan di DIY ini dapat dilakukan juga di daerah-daerah yang lain.

Beberapa upaya Sultan dalam menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa juga dapat dilihat dari pandangan kebangsaan beliau tentang Indonesia. Sultan sering hadir diberbagai forum sebagai pembicara untuk

---

[16] https://profil.merdeka.com/indonesia/s/sri-sultan-hamengkubuwono-x/ (akses: 18/6/2017)

menyampaikan wawasan kebangsaan. Harapannya adalah agar semakin terjaga semangat ke Bhinnekaan dikalangan masyarakat yang sekarang ini sudah banyak mendapat pengaruh dari pihak luar.

Semakin besar rasa cinta tanah air, maka akan semakin besar terwujudnya masyarakat yang rukun, damai, dan pada akhirnya akan menciptakan kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik. Sultan selalu menekankan akan rasa cinta tanah air. Karena hal itu akan mendorong kita untuk semakin berusaha melakukan hal-hal positif demi menjaga keutuhan dan persatuan Negara Republik Indonesia.

D. Letak Geografis Kraton Yogyakarta

Kraton Yogyakarta terletak di pusat kota Yogyakarta. Letaknya sangat strategis, diantara dua lapangan besar yang sering disebut Alun-Alun Utara (LOR) dan Alun-Alun Selatan (Kidul). Secara geografis Yogyakarta terletak di pulau Jawa bagian Tengah. Kraton Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ratawijayan I Yogyakarta sangat dekat dengan Malioboro, dari arah Malioboro lurus ke selatan kita sudah sampai di lokasi wisata tersebut. Dengan luas 3.185,80 km², Kraton dibagi menjadi 7 bagian. Kraton merupakan obyek wisata utama di Yogyakarta, dengan segala adat istiadat dan kebudayaannya menjadi kehidupan masyarakat Yogyakarta.

Ketika Kraton harus berdiri sendiri dan lepas dari Kraton Pakubuwono di Surakarta karena perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755. Kraton Yogyakarta yang juga merupakan istana resmi Kesultanan Yogyakarta sampai tahun 1950 ketika pemerintah Negara Bagian Republik Indonesia

menjadikan Kesultanan Yogyakarta sebagai sebuah daerah berotonomi khusus setingkat provinsi hingga saat ini dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta[17].

[17] Wawancara KRT. H. Jatiningrat. SH (wawancara dilakukan pada hari kamis, 20 april 2017)